

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari pengujian hipotesis dan diskusi tentang bagaimana Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Kendaraan Bermotor (JKB), dan Kepadatan Penduduk memengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022, dapat mengatakan bahwa:

1. Dalam penelitian ini, pengaruh negatif dan signifikan laju pertumbuhan ekonomi terhadap IKLH di Indonesia ditemukan secara empiris. Hasil tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan ekonomi nasional masih didominasi oleh karakteristik *scale effect*, di mana peningkatan aktivitas ekonomi diiringi oleh pemanfaatan sumber daya alam yang intensif. Akibatnya, tekanan terhadap daya dukung ekologis semakin meningkat dan kualitas lingkungan hidup berpotensi mengalami penurunan.
2. Dalam penelitian ini, pengaruh positif dan signifikan IPM terhadap IKLH di Indonesia ditemukan secara empiris. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh capaian pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik berperan dalam mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, tingkat IPM yang tinggi cenderung diikuti oleh meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, sehingga upaya

pelestarian dan pengelolaan lingkungan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

3. Dalam penelitian ini, pengaruh positif dan signifikan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap IKLH ditemukan secara empiris, meskipun hasil tersebut bersifat tidak sesuai secara teoritis. Di satu sisi, peningkatan jumlah kendaraan bermotor berpotensi meningkatkan emisi dan tekanan terhadap lingkungan. Di sisi lain, bertambahnya jumlah kendaraan juga mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kapasitas fiskal yang lebih besar tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih memadai bagi program pelestarian, pengendalian pencemaran, dan rehabilitasi lingkungan, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup.
4. Kepadatan Penduduk terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap IKLH di Indonesia. Aglomerasi demografi secara absolut tidak merusak lingkungan secara langsung. Tekanan fisik dari padatnya penduduk di suatu wilayah mampu diredam dan dinetralisir oleh keberadaan infrastruktur mitigasi ekologis modern (seperti pengolahan limbah terpusat dan ruang terbuka hijau buatan) yang umumnya didanai oleh tingginya kapasitas fiskal di wilayah padat tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka rekomendasi kebijakan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat maupun daerah, terbukti Laju PDRB yang berdampak negatif terhadap IKLH menuntut adanya transisi segera dari model pertumbuhan konvensional menuju kebijakan ekonomi hijau (*green economy*) melalui pengetatan regulasi pada sektor ekstraktif dan industri. Di sisi lain, karena IPM terbukti mampu berkontribusi positif dalam meningkatkan IKLH, pemerintah wajib terus memprioritaskan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pendidikan dan kesehatan guna memperkuat literasi ekologis masyarakat. Selanjutnya, pada variabel Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap IKLH, pemerintah direkomendasikan untuk mengoptimalkan kebijakan alokasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) harus diwajibkan secara spesifik untuk mendanai proyek mitigasi lingkungan, seperti pembangunan taman kota dan perluasan fasilitas transportasi publik.
2. Bagi peneliti selanjutnya juga sangat direkomendasikan untuk menambahkan variabel "Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup (APBD)" sebagai variabel moderasi. Penambahan variabel ini sangat krusial untuk memvalidasi secara matematis dan membuktikan jalur transmisi terkait temuan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup.